

KONFLIK FPI DENGAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO DILIHAT DARI SUDUT PANDANG TEORI OPOSISI

Achmad Arifin Muklai¹, Reza Aprianti², Ryllian Chandra Eka Viana³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: arifinmuklai28@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas konflik FPI dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Tujuan artikel untuk mengetahui konflik fpi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia diperpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, youtube, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam artikel ini secara khusus membahas mengenai penyebab FPI berkonflik dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil temuan yaitu dengan menggunakan teori oposisi (de Brauw, C.C.) ditemukan bahwa tindakan oposisi yang dilakukan FPI didasarkan adanya ketidakadilan oleh sikap dan kebijakan pemerintah terhadap umat islam. Jika dilihat dari teori oposisi de Brauw CC. FPI masuk dalam tahap *Citizen Opposition* (Oposisi Warga Negara). Oleh sebab itu sebenarnya konflik antara FPI dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini berada di dalam ranah hubungan antara pemerintah dengan oposisi, namun karena di dalam sistem politik pemerintah Indonesia tidak terdapat oposisi maka konflik ini terus berlanjut dan tidak terkendali.

Kata Kunci: *Oposisi, Pemerintahan, Presiden Joko Widodo, Front Pembela Islam.*

ABSTRACT

This study discusses the FPI Conflict With The Government of President Joko Widodo Seen From the Point of View of Opposition Theory. Research Objectives To Find Out FPI Conflict With The Government of President Joko Widodo Seen From The Point of View of Opposition Theory. This research is a *library research* to collect data and information by studying library materials available in libraries that have relevance to the problems being discussed in this research such as books, papers, internet, youtube, and so on. In this study, the author uses the documentation method, namely by looking for data on things or variables in the form of notes, transcripts, books, papers and others related to research. The analytical technique used is qualitative descriptive analysis. This study uses opposition theory. In this study, it specifically discussed the causes of FPI conflict with the Government of President Joko Widodo. The findings of this study using opposition theory (de Brauw, C.C.) found that the actions of the opposition carried out by the FPI were based on injustice by the government's attitudes and policies towards Muslims. When viewed from the theory of opposition de Brauw CC. FPI is included in the *Citizen Opposition* stage. Therefore, the conflict between FPI and the government of President Joko Widodo is in the realm of relations between the government and the opposition, but because in the

political system of the Indonesian government there is no opposition, this conflict continues and is not controlled.

Keywords: *Opposition, Government, President Joko Widodo, Islamic Defenders Front.*

PENDAHULUAN

Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas islam yang secara konsisten memosisikan diri sebagai oposisi ketidak'adilan sejak reformasi bahkan secara tidak langsung terlibat dalam politik. Aktivitas Front Pembela Islam (FPI) sejak awal organisasi ini didirikan pada Tahun 17 Agustus 1998 FPI kerap mengeluarkan sikap politik untuk merespon situasi negara. Bahkan menurut Sekretaris FPI Munarman, puncak perjalanan FPI untuk menjadi kelompok yang di pandang berpengaruh secara politik dimulai pada tahun 2014 pada masa kejayaan pemerintahan Presiden Joko Widodo. (*Akun Youtube: Fadli Zon Oficial, 5 Maret 2021*)

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab beserta organisasinya Front Pembela Islam (FPI) mulai banyak dikenal masyarakat Indonesia saat aksinya dalam membela Agama Islam, kasus yang bermula atas adanya penistaan ayat suci al-Qur'an yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta di tahun 2016 silam memunculkan konflik terhadap FPI dan Pemerintah. Peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadikan awal FPI berkonflik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab beserta organisasinya selalu menunjukkan sikap kritik terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam ceramah-ceramahnya dengan statement-statement bernada keras serta kasar yang tertuju kepada pemerintah langsung. FPI juga memperlihatkan ketidak'sukaan mereka terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres 2019. Hingga FPI menganggap Presiden Joko Widodo adalah Presiden ilegal.

Dengan diawalinya permasalahan di atas Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menunjukkan sikap perlawanan atas apa yang dilakukan FPI. Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab beberapa kali dihadapkan dengan beberapa kasus yang menjeratnya, hingga Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas terhadap upaya-upaya yang dilakukan FPI selama kepemimpinan dirinya. FPI dianggap sebagai kegiatan yang mengganggu stabilitas politik pemerintah dan ancaman keamanan terhadap negara. Hingga pemerintah menganggap FPI adalah ormas ilegal karena tidak terdaftar sebagai ormas yang sah dan akhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan pembubaran terhadap

organisasi masyarakat FPI. Pemerintah dengan menggunakan alasan yang tepat dalam membubarkan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sesuai dengan isi SKB Kementerian Dalam Negeri.

Jika dilihat dari sejarah hubungan pemerintah dan oposisi di Indonesia, sebenarnya konflik antara Habib Rizieq Shihab dan organisasinya FPI dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini berada di dalam ranah hubungan antara pemerintah dengan oposisi, namun karena di dalam sistem politik pemerintah Indonesia tidak terdapat oposisi maka konflik ini terus berlanjut dan tidak terkendali. berdasarkan persoalan itu maka peneliti tertarik meneliti konflik FPI dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang oposisi.

Artikel sebelumnya berkenaan dengan penelitian ini ialah: “The Islamic Defenders Front (FPI) As an Opposition Force in the Joko Widodo’s Era in 2014-2020” (Reni Rentika Waty & Kamarudin, 2021). “Peranan Front Pembela Islam (FPI) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017” (Devi Harahap, 2019). “Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi Atau Negara Islam” (Bisma Arianto, 2019).

Adapun tujuan dari artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan Konflik FPI Dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dilihat Dari Sudut Pandang Teori Oposisi. Permasalahan ini perlu diteliti dan dipelajari lebih lanjut karena sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana FPI berkonflik dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

METODE PENELITIAN

Metode dalam artikel ini ialah teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia diperpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, youtube, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti menganalisa data-data yang telah disajikan sebelumnya menggunakan teori oposisi, dalam penelitian ini teori oposisi digunakan untuk menganalisa data yang telah peneliti dapatkan dalam penelitian

HASIL DAN DISKUSI

Bagaimana bentuk oposisi FPI terhadap konflik FPI dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dianalisis menggunakan teori oposisi dari de Brauw, CC. yang menjelaskan Oposisi yang diperankan warga negara. Oposisi ini terjadi karena merujuk pada warga negara yang secara aktif mengekspresikan ketidakpuasan atau ketidaksukaan mereka terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga membuat warga negara mengekspresikan diri sebagai oposisi diluar parlemen yang secara individu. Warga negara dapat melakukan protes dengan cara ikut serta dalam partisipasi publik, menyuarakan pendapat, melakukan aspirasi ataupun turun kejalan yang biasa disebut demonstrasi. (*de Brauw, CC, 2014*)

Sehingga Oposisi muncul dari dampak adanya ekpresi dari kebebasan rakyat untuk memperlihatkan respon serta kritik terhadap kebijakan pemerintah agar dapat sesuai dengan kepentingan warga negara. hakikat oposisi adalah konsekuensi dari adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dengan begitu keberadaan dari oposisi merupakan sebuah kepastian atau keniscayaan dalam kehidupan demokrasi, mengingat pemerintahan demokratis ialah pemerintahan yang membuka keterlibatan *public* yang secara luas.

Konflik ini bermula atas penolakan oleh Front Pembela Islam (FPI), untuk posisi Gubernur DKI Jakarta yang kala itu dipimpin oleh Joko Widodo digantikan oleh Basuki Tjahana Purnama (Ahok) pada tahun 2014 silam. Pada prosesnya. Dalam Penelitian Andi Faisal Bakti (2019). Basuki Tjahaja Purnama dijadikan Pelaksana tugas PLT Gubernur DKI Jakarta. Selama menjadi PLT BTP mengeluarkan kebijakan yang dianggap merugikan FPI. 1. Kebijakan Larangan Takbir Keliling, 2. Kebijakan Peredaran Minuman Keras (Miras) 3. Kebijakan Pembongkaran Masjid, 4. Kebijakan Larangan Pengajian/ Tabligh Akbar di Kawasan Monas, 5) Kebijakan Larangan Penjualan Hewan di Sembarang Tempat. (*Andi Faisal Bakti, 2019:96*).

Kegiatan FPI tercatat selama masa PLT BTP sebagai Gubernur selalu melakukan unjuk rasa hal ini dikarenakan adanya kezoliman atas kebijakan PLT Basuki Tjahana Purnama (Ahok) atau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kecintaan Habib Rizieq Shihab terhadap agama memandang selama Basuki Tjahana Purnama (Ahok) dalam memerintah Jakarta telah merusak akidah serta menyudutkan umat islam dengan kebijakan nya yang kontroversi seperti memperbolehkan Peredaran Minuman Keras serta melarang kegiatan beribadah umat islam. (*Reni Rentikawaty, 2021:124*).

Jika mengacu pada pandangan teori oposisi de Brauw, CC. yang mengatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk melakukan kegiatan protes terhadap kebijakan pemerintah. Maka peneliti melihat bahwa secara tidak langsung FPI memainkan peran aktif sebagai ormas yang mengawasi jalannya suatu pemerintah hal ini terlihat pada tindakan-tindakan nyata dari pada kegiatan FPI dilihat dengan lantang menyuarakan pendapat melalui mimbar (ceramah) atau unjuk rasa yang menolak Basuki Tjahaja purnama alias Ahok menduduki jabatan Gubernur DKI.

Ditahun 2016 telah terjadi fenomena langka yang terjadi pada sebagian umat islam di Indonesia ialah dengan munculnya serangkaian aksi bela islam yg telah berhasil melobilisasi amat banyak masa muslim di Jakarta. Wacana yang sejauh ini muncul terkait adanya gerakan aksi bela islam ini dipicu oleh kasus penodaan agama yg dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini terjadi pada saat kunjungan kerjanya ke pulauan seribu, dan saat itu dalam pidatonya ternyata merujuk kepada penghinaan terhadap ayat suci al-qur'an surat al-maidah ayat 51.

Menurut Sandy Anugrah Tangkas (2021). Politik Indonesia kontemporer saat ini menunjukkan sebuah realitas menguatnya kebangkitan Islam politik, dalam bentuk populisme politik Islam. Sehingga penggunaan istilah populisme Islam untuk menjelaskan fenomena politik sebagian kalangan umat Islam Indonesia merupakan eksistensi dari populisme politik dengan menekankan identitas Islam. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (*Muhtadi, 2019*).

Gerakan-gerakan sosial politik yang identik dengan nilai-nilai Islam dalam kontestasi politik di Indonesia dewasa ini, diantaranya bisa dilekatkan dengan gerakan politik Islam yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) hal ini berkaitan dengan peristiwa unjuk rasa yang dikenal dengan sebutan Aksi Bela Islam. Sebagai satu fenomena politik yang terjadi di Indonesia, Aksi Bela Islam merupakan sebuah wujud partisipasi publik dari *Citizen Opposition* (Oposisi Warga Negara)

Dalam sudut pandang teori oposisi de Brauw CC yang mengatakan Oposisi warga negara adalah oposisi yang keluar dari sikap setiap individu yang secara aktif mengikuti keputusan ataupun kebijakan yang dibuat badan pemerintah. Warga negara dapat melakukan protes dengan cara ikut serta dalam partisipasi publik, menyuarakan pendapat melalui dialog terbuka, melakukan aspirasi ataupun turun kejalan yang biasa disebut demonstrasi

Berlandaskan pada teori oposisi, peneliti melihat Aksi bela Islam (ABI) menjadi memontum untuk warga negara menyalurkan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah secara langsung. Peneliti menganggap Front Pembela Islam merupakan bentuk dari oposisi warga negara. Mengapa peneliti menganggap hal itu demikian, karena Gerakan politik FPI ditunjukkan dengan memberikan sikap kritisi kepada pemerintah dengan menilai terhadap Sikap Presiden yang seakan-akan melindungi kasus penistaan agama.

Disisi lain Komisis Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membuat catatan 2 tahun Pemerintahan Joko Widodo, menurut Kontras sepanjang dua tahun memimpin di periode keduanya, demokrasi mati secara perlahan (*kontras.org*). tidak hanya lembaga-lembaga besar yang menyoroti situasi pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak juga dari kalangan kelompok rakyat akar rumput yakni salah satunya Front Pembela Islam (FPI)

Dengan posisi bersebrangan terhadap pemerintah saat Reuni 212 FPI memiliki harapan dan keinginan adanya pergantian sosok pemimpin nasional yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Habib Rizieq Shihab berpesan bahwa perlunya adanya perubahan “*Jangan lupa bahwa negeri kita saat ini sedang karut-marut maka kita harus melakukan perubahan*” dan menurut hemat saya, bahwa perubahan dalam waktu dekat di depan mata saya tidak lain adalah 2019 Ganti Presiden” (*news.detik.com*)

FPI berinisiatif menggelar serangkaian diskusi politik keagamaan yang disebut Ijtima Ulama. Ijtima pertama dan kedua tujuannya untuk memberikan dukungan bagi Prabowo Subianto dalam melawan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres 2019. Banyaknya kegiatan FPI dengan melakukan pertemuan penting antara Habib Rizieq Shihab dengan petinggi partai-partai politik dan tokoh-tokoh nasional atau para elit kekuasaan ini menunjukn bahwa FPI bersikap bersebrangan terhadap Pemerintah

Bila dilihat dari sudut pandang oposisi *de Brauw, CC* yang mengatakan Oposisi yang diperankan warga negara. Oposisi ini terjadi karena merujuk pada warga negara yang secara aktif mengekspresikan ketidakpuasan atau ketidaksukaan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

Berdasarkan apa yang peneliti amati, menunjukkan bahwa Aksi 212 memang telah menjadi gerakan politik praktis yang tidak bisa dianggap sebagai perjuangan moral murni, eskalasi sikap FPI yang diperlihatkan ialah mengkritisi dan unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap oleh FPI tidak pro terhadap warga negara, dan bentuk politik praktis

FPI lainnya terhadap pemerintah terlihat pada saat pilpres 2019 FPI menginginkan adanya pergantian kepala negara (Presiden) sehingga FPI membentuk koalisi Ijtima Ulama untuk menyatakan sikap politik melawan pemerintahan Ppresiden Joko Widodo.

Relasinya yang kuat dengan FPI sebagai organisasi menyebabkan figurnya sangat identik dengan FPI. Bisa dikatakan bahwa FPI merupakan transformasi dari Habib Rizieq Shihab dan bisa juga dikatakan bahwa Habib Rizieq Shihab adalah FPI. Sebelum keterlibatannya di Aksi Bela Islam dan politik praktis, FPI lebih dikenal dengan aksi-aksi jalannya dan razia di tempat yang dianggap sebagai sarang maksiat. Selain itu, organisasi FPI juga beberapa kali terlibat di aksi-aksi intoleran, seperti penutupan masjid Syiah dan Ahmadiyah sampai pembangunan gereja.

Front Pembela Islam (FPI) yang berhadapan langsung terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo nyatanya menimbulkan konflik diantara keduanya. Kegiatan FPI selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni demonstrasi dengan cara memobilisasi massa dan mengkritik pemerintah melalui ceramah online terhadap ketidakpuasan dari umat terhadap penanganan kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjana Purnama dengan dugaan intervensi dari pemerintah. Serta ketidaksukaan FPI terhadap Kebijakan Pemerintah.

FPI termasuk kelompok yang memotori Aksi Bela Islam di Monas pada 2016 lalu atau saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Aksi Bela Islam terus dilakukan di berbagai kesempatan. Mereka menyebut dirinya dengan Alumni 212. FPI terbilang sering menggelar aksi demonstrasi menyikapi situasi dipemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai contoh Saat pemerintah menyuruh DPR untuk mengesahkan RUU Omnibuslaw. FPI pun langsung mengerahkan massa turun ke jalan untuk menolak RUU tersebut disisi lain melalui Imam Besar FPI mengkritik Pemerintah melalui ceramah media online terkait Saat DPR merancang RUU Haluan Ideologi Pancasila

FPI yang selalu bersikap tidak bersahabat dengan pemerintah, posisi yang terus bersebragan dengan pemerintah dalam banyak hal termasuk dalam pandangan-pandangan politik, sikap yang selalu vokal dengan sikap kritisi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan terhadap warga negara. Sikap yang bersebragan terhadap pemerintah nyatanya membuat FPI dihadapkan beberapa masalah yang terus-menerus menimpanya.

Kegiatan aksi FPI terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap oleh pengamat politik sebagai kegiatan yang mengganggu stabilitas politik pemerintah dan ancaman keamanan

terhadap negara. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pemuda Muslim Indonesia (DPP LPMI) Abdillah Zain mengatakan, secara ideologis maupun praktik, FPI memang menjadi ancaman negara. (*metro.sindonews.com*).

Dalam orasi pertamanya semenjak kedatangan dari Arab Saudi, Habib Rizieq Shihab menjelaskan bahwa revolusi akhlak yang dia maksud bertujuan untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (*Muhammad Rizky Harahap, 2022:37*). Dalam konferensi pers yang diselenggarakan malam hari di Mabes TNI tanggal 14 November 2020, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa “*siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI*” (*Pattisina, 2020*).

Secara eksplisit menyebutkan bahwa isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas. Di pasal sebelumnya, UU Ormas yang telah direvisi bertujuan untuk “menjaga eksistensi ideologi Pancasila, keutuhan NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 sebagai konsensus dasar bernegara. (*Muhammad Rizky Harahap, 2022:41*). bisa dikatakan bahwa pemerintah menganggap FPI yang dianggap mendukung khilafah sebagai ancaman terhadap Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 yang merupakan dasar negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Diatas peneliti melihat tampak Kegiatan FPI dianggap pemerintah sebagai ancaman Stabilitas politik Negara. Padahal ketika ada warga negara melakukan proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah, maka ada hak dan kewajiban warga negara yang dijamin UUD 1945 pasal 28 terkait peran untuk ikut partisipasi yang diperbolehkan didalam negara demokrasi seperti Indonesia ini. Namun pemerintah menganggap bahwa kegiatan FPI sebagai sebuah ancaman stabilitas negara menurut MenkoPolhukam Mahfud MD. (*nasional.sindonews.com*)

Berdasarkan ucapan pakar-pakar hukum tata negara peneliti melihat dalam konteks hukum pembubaran FPI tidak termasuk pada aspek hukum melainkan bahwa tindakan pemerintah untuk membubarkan FPI adalah bentuk dari sikap politik pemerintah dalam menanggapi FPI. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah ini masuk dalam ranah oposisi. Front Pembela Islam (FPI) yang sejak tahun 2014 silam Hingga 2020 yang begitu konsisten bersebrangan dengan pemerintah Presiden Joko Widodo dan Sikap vokal FPI yang selalu mengkritisi pemerintah. Dilihat dari sudut pandang teori oposisi konflik FPI dengan Pemerintah masuk dalam ranah oposisi yang disampaikan oleh de Brauw CC. yang menyebutkan

tiga penyebab muncul oposisi warga negara yaitu Pertama, Kelompok atau individu yang berada diluar pemerintah, memiliki jaringan informasi mengenai hal-hal yang mereka rasakan sepenuhnya tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat umum. Sehingga hal inilah yang mengarahkan mereka untuk berpartisipasi publik terhadap proses pembuatan kebijakan. Kedua, Warga negara dalam masyarakat demokratis memiliki hak normatif untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mungkin dapat memberi masukan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Ketiga, Dengan mengikutsertakan warga negara dalam pengambilan keputusan, warga negara akan lebih memahami dan berkomitmen pada keputusan akhir dan oleh karena itu lebih mungkin menerima konsekuensinya, bahkan jika hal itu dapat merugikan bagi warga negara. Sebaliknya jika partisipasi dari warga negara tidak diikuti sertakan dalam proses pengambilan keputusan dengan demikian dapat meningkatkan kemungkinan oposisi warga negara terlahir dan akan menentang rencana pengambilan keputusan tersebut

Jika dilihat dari ucapan teori oposisi de Brauw CC. dalam ketiga poin tersebut FPI masuk dalam tahap *Citizen Opposition* (Oposisi Warga Negara). Oleh sebab itu sebenarnya konflik antara Habib Rizieq Shihab dan organisasinya FPI dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini berada di dalam ranah hubungan antara pemerintah dengan oposisi, namun karena di dalam sistem politik pemerintah Indonesia tidak terdapat oposisi maka konflik ini terus berlanjut dan tidak terkendali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan oposisi yang dilakukan FPI didasarkan adanya ketidakadilan oleh sikap dan kebijakan pemerintah terhadap umat islam. Sehingga FPI melakukan serangkaian tindakan untuk melawan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dimulai dari Aksi Bela Islam untuk menekan pemerintah dan aksi 212 untuk menyatakan sikap terhadap pemerintah. Hingga tindakan oposisi FPI mengakibatkan pemerintah mengambil sikap tegas dengan melakukan pembubaran terhadap organisasi Front Pembela Islam (FPI) sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) keenam menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Abiyoso, Wiradeti & Thohari, Slamet (2019) Gerakan Front Pembela Islam (FPI) dalam Aksi Bela Islam tahun 2016 di Jakarta. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, Volume 3 No. 2.

- Andi Faisal Bakti, 2019. *Communication and Family Planning in Islam in Indonesia* (Leiden-Jakarta: INIS)
- Andriyani, L. (2017). FPI dan Demokrasi: Pandangan FPI tentang Demokrasi dan Pengelolaan Konflik di FPI. *Journal Prosiding Seminar Nasional APSIPOL*, Volume 4 No. 3.
- Anwar, Saeful (2018) *Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) Di Indonesia 1989-2012*. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 4 No.1.
- Argenti, Gili. "Islam Politik di Indonesia: Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 dari Gerakan Demonstrasi Ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik dan Ekonomi." *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 4 No. 2.
- Asep Saeful Muhtadi (2012). *Komunikasi Dakwah: Teori, Pendekatan, Dan Aplikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Batubara, Marwan (2017). *Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok Menuntut Keadilan untuk Rakyat*, Jakarta Selatan: YPSI (Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia).
- Harahap, Devi. 2019. *Peranan Front Pembela Islam (FPI) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017*
- Huda, Sholihul (2019) *Fpi: Potret Gerakan Islam Radikal Di Indonesia*. *Jurnal Um*, Volume 5 No. 2.
- Junior, Ibnu Umar (2017). *The Legend - Biography Of Habib Rizieq Shihab - Singa Allah Dari Negeri Timur*, Jakarta: Pujangga Tunggal.
- Maula, M. I. (2019). *Pandangan Muhammad Rizieq Shihab tentang Pancasila*. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume 2 No. 2.
- Muhammadi, Fikry (2017). *Sisi Lain Habib Rizieq*, Jakarta Selatan: PT. Zaytuna Ufuk Abadi
- Muzzammil, As'ad (2016). *Politik Identitas dan Gerakan Sosial Islam (Studi Atas Front Pembela Islam)*, Tangerang: Transwacana Press Ciputat.
- Surbakti, Ramlan (2019). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Pengawal HRS (2021). *Buku Putih Pelanggaran Ham Berat Pembunuhan Enam Pengawal HRS*, Jakarta Selatan: Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia (YPSI).
- Wilson, Ian Douglas (2018). *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*, Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri.
- Cubadak, 1 April 2019. *Habib Rizieq Ungkap Ketidak Adilan Di Masa Jokowi*. <https://www.youtube.com/watch?v=3ebjN2-rNoo&list=PLhaElreUZh0BbhZ-Fkmbv2IKEu8IvZcyn&index=29>, diakses pada 11 Juli 2021
- Cubadak, 27 April 2019. *Terbaru Habib Rizieq Maklumat Mekkah 27 April 2019*. <https://www.youtube.com/watch?v=QW1GZMQrDAA&t=46s>, Diakses pada 17 Januari 2022.
- De Brauw, A. & Peterman, A. 2014. *Can conditional cash transfers improve maternal health and birth outcomes?: Evidence from El Salvador's Comunidades Solidarias Rurales*. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Fadli Zon Official, 18 Desember 2020. *FPI Sweeping Kekuasaan Yang Zalim*. https://www.youtube.com/watch?v=_9CotW0rpp0, diakses pada 10 Juli 2021

- Kontras.org, 19 Oktober 2021, Catatan 2 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin. <https://kontras.org/2021/10/19/catatan-2-tahun-pemerintahan-joko-widodo-maruf-amin-demokrasi-perlahan-mati-di-tangan-jokowi/>, diakses pada tanggal 12 November 2021.
- Metro.sindonews.com, 21 November 2020, LPMI Desak Pemerintah Bubarkan FPI. <https://metro.sindonews.com/read/240706/171/lpmi-desak-pemerintah-bubarkan-fpi-karena-dinilai-ancaman-negara-1605953491>, diakses 28 November 2021.
- Nita Griselda, Christina Menuk Sri H, Bisma Arianto. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Dan Disiplin Kerja terhadap kinerja Pegawai di puskesmas Tunabesi Kabupaten Malaka, NTT. *Journal of Sustainability Business Research* Vol 2 No 1.
- Rentikawaty, Reni. 2021. The Islamic Defenders Front (FPI) As an Opposition Force in The Joko Widodo's Era in 2014-2020. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijik/article/view/13147/5757>
- Sekretariat Kabinet RI, 31 Oktober 2016. Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Rencana Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 4 November 2016. https://www.youtube.com/watch?v=_1JesFjeYf0, diakses pada 15 Juli 2021
- STEVANUS J. GOMIES, & VICTOR PATTIASINA. (2011). Analisis Kontribusi Pemerintahan Daerah dalam Era Global. *Jurnal Aset*, 13(2), 175–184.